

EDISI : Jurnal, 13 September 2019

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Nusa Bali*

Kategori : *Dinas sosial*

Penerima Jaminan Sosial Disabilitas Tersisa 96 Orang

SINGARAJA, NusaBali

Sempat kacau akibat perapian data di pusat, akhirnya Buleleng mendapatkan kepastian terkait jumlah penerima jaminan sosial bagi penyandang disabilitas. Jumlah penerima jaminan yang termasuk dalam program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) tahun 2019 kini hanya berjumlah 96 orang dari data awal 268 orang.

Pengurangan jatah ASPDB di Kabupaten Buleleng itu disebut Kepala Dinas Sosial Buleleng, I Gede Sandhiyasa, Kamis (12/9) kemarin dikarenakan penataan kembali data di Kementerian Sosial. Sebanyak 171 orang penerima ASPDB pun tereliminasi karena sudah tertanggung dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Sehingga yang mendapatkan ASPDB hanya penyandang disabilitas yang benar-benar belum tersentuh bantuan.

"Jadi tahun ini yang sudah tercover PKH tidak dibolehkan lagi menerima ASPDB, karena di PKH sudah ditanggung biayanya," jelas I Gede Sandhiyasa. Penataan kembali data pemerintah pusat ini dimaksudkan agar tidak ada yang menerima bantuan dobel. Sedangkan yang masuk dalam daftar antre masih banyak



I Gede Sandhiyasa

Dalam proses penataan itu Kemensos juga disebut melakukan pendataan kembali ke lapangan dengan menggunakan aplikasi yang akan menganalisa langsung komponen yang dimasukkan oleh pendamping disabilitas, layak atau tidak mendapatkan ASPDB senilai Rp 300 ribu per bulannya. Dari hasil pendataan yang sudah dilakukan, juga ditemukan 20 orang penyandang disabilitas yang disebut tidak tepat.

"Komponen datanya sangat komplrit sekali dan sistemnya yang langsung

menyatakan apakah disabilitas yang bersangkutan layak atau tidak," imbuh Kadisos Sandhiyasa. Bahkan menurutnya ada penyandang disabilitas yang semula menerima ASPDB ini disebut tidak elijibel. Sebagian ditemukan karena sudah meninggal, mampu dari segi ekonomi, atau wali yang menanggungnya selama ini kondisi ekonominya mampu, sehingga langsung dicoret dari sistem.

Sementara itu dengan penataan kembali data penerima ASPDB, Kabupaten Buleleng di tahun ini juga mendapatkan jatah dari pusat untuk pengajuan kembali sebanyak 311 orang. Jumlah kuota itu pun disebut Sandhiyasa dapat dialihkan kepada penyandang disabilitas yang selama ini masih masuk dalam daftar tunggu. Dinas Sosial Kabupaten Buleleng juga berharap bantuan ASPDB yang penerimaannya kacau dari tahun 2018 hingga saat ini, kembali normal tahun ini. "Mudah-mudahan tahun ini sudah mulai normal kembali dengan pendataan kembali," jelas dia.

Selain ASPDB dari dana pusat, Pemkab Buleleng juga menganggarkan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas sebanyak 100 orang, dengan bantuan yang diterima Rp 1 juta per tahunnya. **k23**



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Nusa Bali*

Kategori : *Disperkimta*

Disperkimta Jemput Bola Bantuan Hibah Air Limbah



Ni Nyoman Surattini

SINGARAJA, NusaBali

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) Buleleng kembali menjemput bola bantuan hibah air limbah ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI. Sebanyak 100 unit pembangunan *septic tank* individu diajukan untuk menangani kawasan kumuh di Buleleng.

Kepala Disperkimta Buleleng, Ni Nyoman Surattini, Kamis (12/9) kemarin menjelaskan, bantuan hibah air limbah dari KemenPUPR merupakan program rutin setiap

tahunnya. Program yang men-
yasar kota kumuh di Indo-
nesia itu ditujukan kepada
Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR). "Program ini
ada setiap tahun dan harus
ada komitmen dari pemerin-
tah daerah, karena bantuan ini
sistemnya *reimburse*. Dana baru
dicairkan saat bangunan sudah
jadi dan dinilai memenuhi
persyaratan, sedangkan biaya
pembangunan awalnya dibiayai
Pemkab," ujar Surattini.

Bangunan yang berupa *sep-
tictank* individu itu setelah
selesai dikerjakan dengan ang-

garan Rp 4 juta per unit akan
diverifikasi kembali oleh tim
pusat. Setelah dinyatakan me-
enuhi syarat dana baru akan
dicairkan ke kas pemerintah
daerah. Khusus tahun ini Dis-
perkimta Buleleng mengajukan
kembali 100 unit yang men-
yasar 27 desa yang menjadi
konsentrasi pembangunan di
tahun depan. "Kalau tahun
lalu fokusnya di kota wilayah
kumuh, tahun ini di 27 desa
yang diprioritaskan di sembilan
kecamatan," imbuh dia.

Sementara itu terkait dengan
kawasan kumuh di Buleleng,

Surattini pun tak menampik
jika dengan program ini masih
menyisakan banyak desa atau
kelurahan yang berpotensi men-
jadi kawasan kumuh. Pengen-
tasan wilayah kumuh hingga
saat ini masih menjadi PR bagi
Disperkimta dan instansi terkait,
selain digenot dengan program
sanitasi limbah perorangan mau-
pun komunal. "Kalau kawasan
yang rmetan kumuh masih ban-
yak. Tapi program pengentasan
kumuh harus diintegrasikan
dengan dinas terkait dan masih
terus diupayakan," jelas Ni Ny-
oman Surattini. **k23**



9 Desa Terancam Tak Kebagian Dana Desa Tahap III

★ Penggunaan Tahap II Belum Dipertanggungjawabkan

Jika belum mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa tahap sebelumnya, maka dana desa tahap III yang tersisa 40 persen akan hangus dan dikembalikan ke kas negara.

SINGARAJA, NusaBali
Sebanyak 29 desa dari 129 desa di Kabupaten Buleleng, terancam tidak dapat mencairkan jatah Dana Desa tahap III. Masalahnya, 29 desa itu belum membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Dana Desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat di tahun 2019, untuk 129 Desa di Buleleng sebesar Rp 124 miliar. Masing-masing desa mendapat bagian Dana Desa rata-rata kisaran Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar, tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk miskin.

Pencairan dana tersebut terbagi dalam tiga tahap, rinciannya tahap I sebesar 20 persen, kemudian tahap II dan III masing-masing 40 persen. Dalam pencairannya ada syarat, dimana masing-masing desa harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya. Untuk pencairan tahap III, maka penggunaan Dana Desa tahap I dan II sudah harus dipertanggungjawabkan.

Dalam pertanggungjawaban itu, realisasi Dana Desa tahap I

DAFTAR 29 DESA DI KABUPATEN BULELENG

KECAMATAN SAWAN

1. Desa Giri Emas
2. Desa Galungan
3. Desa Bebetin

KECAMATAN SUKASADA

1. Desa Pegayaman
2. Desa Selat
3. Desa Kayu Putih

KECAMATAN BULELENG

1. Desa Anturan
2. Desa Sari Mekar
3. Desa Poh Bergong
4. Potandakan
5. Pengelatan

KECAMATAN TEJAKULA

1. Tembok

KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

1. Desa Tunjung
2. Desa Tamblang

KECAMATAN GEROKGAK

1. Desa Pemuteran
2. Desa Penyabangan
3. Desa Musi
4. Desa Sanggalangit
5. Desa Celukan Bawang

KECAMATAN SERIRIT

1. Desa Ularan
2. Desa Tangguwisia
3. Desa Pengastulan
4. Desa Bubunan
5. Desa Umeanyar

KECAMATAN BUSUNGBIU

1. Desa Kedis
2. Desa Kokeran
3. Desa Sepang Kelod

KECAMATAN BANJAR

1. Desa Tirta Sari
2. Banjar Togeha

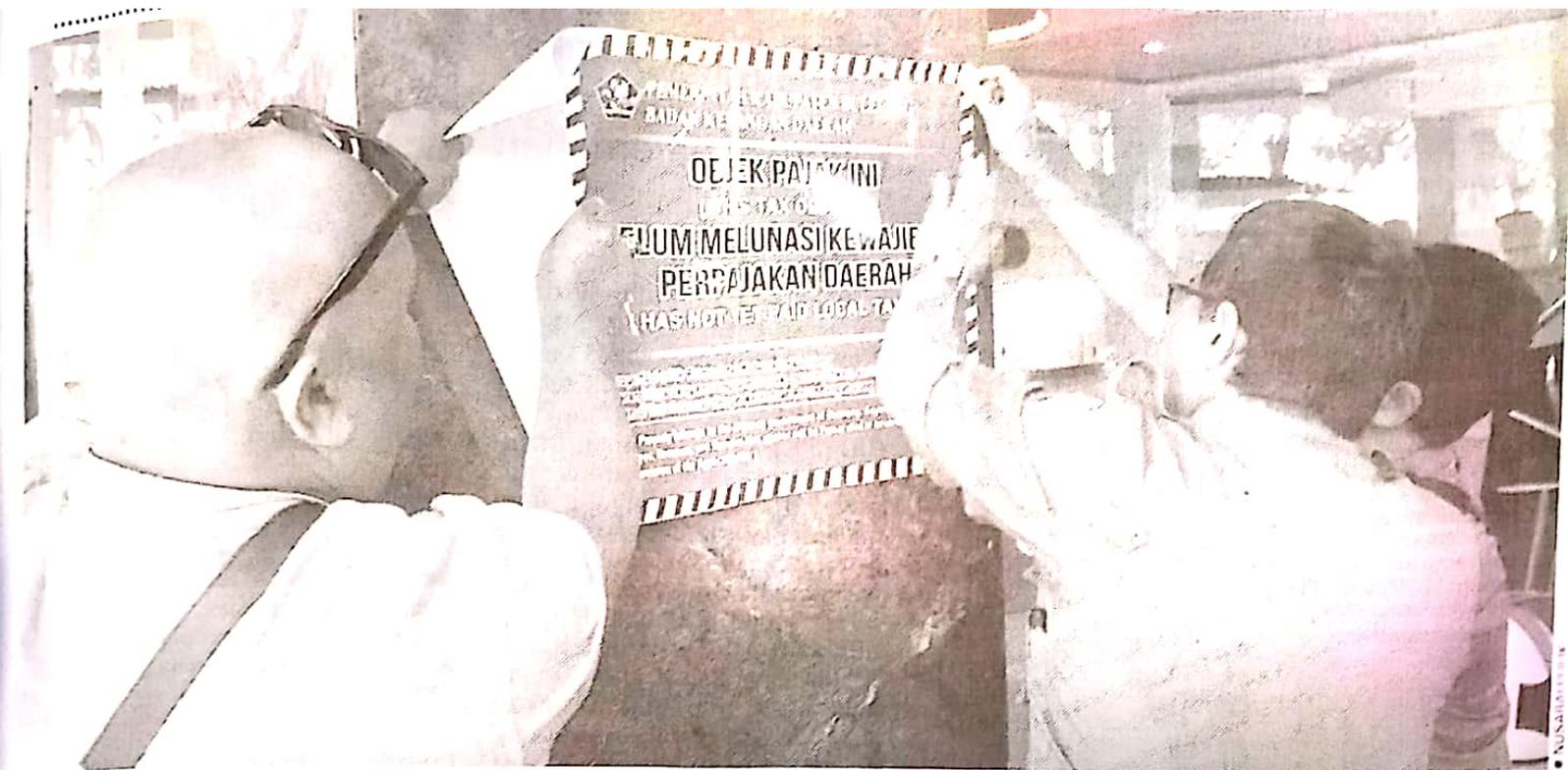
dan II minimal sudah 75 persen, dengan capaian (output) fisik di atas 50 persen. Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahap II ini sudah harus masuk September 2019 ini. Karena memasuki Oktober 2019, sudah mulai pencairan Dana Desa tahap III.

Namun hingga memasuki pertengahan bulan September, masih ada 29 Desa yang belum

menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahap II. Informasinya, 29 Desa yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban itu tersebar di sembilan kecamatan yang ada.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buleleng, I Made Subur dikonfirmasi Kamis (12/9), tidak menampik kondisi 29 desa yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahap II sebagai syarat pencairan Dana Desa tahap III. "Memang masih ada beberapa desa yang belum melaporkan, tetapi secara keseluruhan, pencairan Dana Desa di Kabupaten Buleleng telah mencapai 86 persen," kata Subur didampingi Kasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset PMD Buleleng, Madong Hartono. Menurutnya, PMD akan menunda pencairan jatah Dana Desa tahap III bagi 29 Desa, bila sampai batas akhir pengajuan pencairan belum juga menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya. "Kecuali 29 desa itu segera menyelesaikan LPI-nya, sebelum batas akhir pengajuan amprahan bulan September ini. Jadi masih ada waktu mengajukan pencairan tahap III, dan kami sudah sampaikan juga agar secepatnya dibuat, karena waktu tinggal beberapa hari," tegas Kasi Madong.

Bila hingga batas akhir pengajuan pencairan Dana Desa, 29 desa tersebut belum juga membuat laporan pertanggungjawaban, secara otomatis sisa jatah Dana Desa sebesar 40 persen, tidak bisa dicairkan. Dana tersebut akan kembali ke Kas Negara, sebagai Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). k19



PENEMPELAN stiker oleh BKD Buleleng pada Singaraja Hotel karena menunggak bayar pajak senilai hampir setengah miliar rupiah, Kamis (12/9).

Tunggak Pajak, Singaraja Hotel Dipasang Stiker

SINGARAJA, NusaBali

Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng kembali menempelkan stiker ketidakpatuhan wajib pajak pada Kamis (12/9). Setelah Kinaara Resort di Desa Pemuteran, disusul Singaraja Hotel di Singaraja Square, karena menunggak pajak ratusan juta. Hotel lima lantai yang sebelumnya bernama Pop! Hardys Hotel di-sebut tak membayar pajak tahun 2018 dan absen melaporkan pajak di bulan Juni-Agustus 2019.

Penempelan stiker pada hotel berlokasi tak jauh dari Eks Pelabuhan Buleleng tersebut dilakukan BKD Buleleng didampingi Satpol-PP Buleleng pukul 09.00 WITA. Sebelum melakukan penempelan stiker pada hotel yang memiliki 149 kamar tersebut, BKD Buleleng yang dipimpin Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan Pajak, I Gede Sasnita Ariawan, telah

melayangkan Surat Peringatan (SP) 1 dan Surat Peringatan (SP) 2.

"Pemasangan stiker ini tak *ujug-ujug* langsung dilakukan, tetapi sebelumnya kami sudah lakukan pendekatan dan SP 1. Setelah tujuh hari tidak juga digubris, kami lanjutkan ke SP 2 dengan penempelan stiker," ujar I Gede Sasnita Ariawan. Hasil tarikan dari BKD Buleleng disesuaikan dengan *seft assessment* yang dilakukan oleh pihak hotel beralamat di Jalan Surapati Singaraja disebut menunggak pajak hotel, restoran dan air tanah sebesar Rp 443.693.289.

Dirinya pun merincikan sebanyak Rp 427.608.117 pajak hotel, Rp 15.786.362 pajak restoran dan Rp 298.750 pajak air tanah. Jumlah itu pun disebut I Gede Sasnita Ariawan sudah termasuk denda akumulasi dari tunggakan pajak di tahun 2018. "Kami juga pertim-

bangkan tunggakan yang kecil. Yang kecil saja tidak dibayar, bagaimana kepatuhan wajib pajak," imbuh dia.

Selanjutnya hotel yang berdiri sejak 2014 ini diberikan batas waktu *unlimited* untuk membayarkan tunggakan. Hal itu disebut Sasnita sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 18 Tahun 2018 pasal 12 ayat 5, yang menyatakan apabila surat penagihan kedua tidak ada niat juga membayar atas hutang pajaknya, dilanjutkan penempelan stiker yang menegakkan objek pajak belum membayar pajak. BKD juga akan mempertimbangkan mengambil jalan Yustisi jika setelah SP2 dan penempelan stiker tak juga ada niat baik pihak hotel. Sementara itu Manajer Singaraja Hotel, Putu Danu Sartika Yasa, mengatakan soal tunggakan pajak pihak manajemen

selaku operator menyerahkan keputusan kebijakan kepada *owning company*. Manajemen hotel mengaku setiap bulannya sudah melaporkan dan mengajukan pembayaran pajak pada *owning company*.

"Hal ini menjadi istilahnya kekecewaan besar bagi kami manajemen, karena berdampak sekali dari pelanggan melihat tertempelnya stempel. *Brand image* jelek di masyarakat. Tetapi hal ini kami tetap akan sampaikan ke *owning company*, agar hari ini atau besok bisa dibayarkan tunggakan pajak itu," jelas Danu Sartika.

Pihak hotel mengaku *cash flow* hotel sangat terbatas pasca bangkrutnya PT Hardy's. "Kalau bayar pajak satu dua bulan, operasional lain akan keteteran. Sehingga kami juga sangat kecewa dengan *owning company*," kata dia. k23



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Nusa Bali*

Kategori : *Operasi*

Permohonan SIM Meningkat

SINGARAJA, NusaBali

Permohonan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam dua pekan terakhir mengalami peningkatan hingga 50 persen per harinya. Peningkatan angka permohonan SIM diklaim Satlantas Polres Buleleng karena intensitas Operasi Patuh Agung 2019.

Kasat Lantas Polres Buleleng, AKP Putu Diah Kurniawandari, Kamis (12/9) kemarin menjelaskan jika hari biasa permohonan SIM baru hanya 100 lembar, saat operasi patuh sekitar 150 lembar. "Operasi yang intensitasnya kami tingkatkan ternyata berdampak pada pemohonan SIM yang meningkat, dari segi tertib surat berkendara ini menunjukkan hasil yang positif, mudah-mudahan hal ini tetap bertahan," ujar Kasat Putu Diah Kurniawandari saat ditemui di Mapolres Buleleng.

Sedangkan dari jumlah pelanggaran yang terjaring Ops Patuh Agung 2019, menunjukkan peningkatan



OPERASI Patuh Agung yang menjaring 1.275 pelanggaran selama 14 hari pelaksanaan.

sebesar 98 persen dibandingkan dengan tahun 2018. "Pelanggaran 1.129 langsung tilang dan 59 teguran, meningkat 98 persen dari tahun 2018, tetapi kami masih melakukan evaluasi peningkatan intensitas operasi karena di daerah lain juga belum berpengaruh pada angka penurunan laka," ucap Kasat Diah.

Sepanjang Operasi Patuh Agung, Satlantas Polres Buleleng mengaku tak

mengalami kendala berarti. Hanya sempat menggeser Target Operasi wilayah rawan kecelakaan dari kecamatan Buleleng ke kecamatan Sulkasada, melihat kasus kecelakaan cukup banyak di daerah Sulkasada. Tren pelaku pelanggaran pun belum bergeser dari tahun sebelumnya yang didominasi oleh karyawan swasta dan rentang umur dari 20-30 tahun. Sedangkan untuk korban kecelakaan lalu lintas dialami oleh pelajar

dan mahasiswa.

"Pelanggaran yang terbanyak memang yang tidak memakai helm sesuai standar, safety belt dan juga pengendara di bawah umur, jelas juga tidak memiliki SIM," tegas Satlantas. Dengan kondisi yang sangat kompleks tersebut Satlantas Polres Buleleng juga memunta kepada orang tua ikut membina anak-anak mereka. k23